

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pariwisata

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek, dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Salah satu jenis pariwisata adalah wisata yang berbasis alam, atau yang sering disebut ekowisata. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, sedangkan pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam (Kumesan, 2015).

Menurut Ramaini (1992:85), Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dalam bidang tersebut.

Menurut Yoeti (1996), industri pariwisata merupakan kumpulan dari bermacam-macam perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan selama dalam perjalanan, misalnya, perusahaan transportasi, perhotelan, rumah makan dan restoran, serta industri

rumah tangga dan sektor ekonomi informal lainnya. Juga sangat tergantung dari regulasi pemerintah, seperti imigrasi, visa dan fiskal, serta pajak dan retribusi.

Wisatawan adalah setiap pengunjung yang tinggal lebih dari 24 jam dan kurang dari enam bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan untuk berlibur, rekreasi, olah raga, bisnis, mengunjungi teman/keluarga, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar dan atau kegiatan keagamaan (Kusmayadi dan Sugiarto 2000:4).

2.2 Ekowisata Pantai

Pantai sebagai suatu ekosistem yang unik memiliki berbagai fungsi yang mampu memberikan manfaat bagi manusia yang tinggal di sekitarnya. Manfaat yang diberikan oleh pantai bisa didapat secara langsung dan tidak langsung. Manfaat yang didapat secara langsung diperoleh dengan eksploitasi sumberdaya yang ada di pantai antara lain: ikan, lobster, dan tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan secara tidak langsung diperoleh dari keberadaan tanaman yang mampu menahan abrasi air laut serta potensi sebagai objek wisata yang memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya (Jati, 2016).

Pemanfaatan ekosistem pantai harus dilaksanakan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (UU No.4/82) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa pengelolaan lingkungan harus didasarkan pada azas pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan. Setiap pemanfaatan lingkungan hidup seperti pantai harus dilaksanakan dengan syarat harus mampu memberikan manfaat tidak hanya untuk saat ini juga, melainkan juga untuk seterusnya. Dengan menjaga keberadaan ekosistem yang ada diharapkan mampu menarik pengunjung secara terus menerus, dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

2.3 Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam

2.3.1 Konsep dan Teknik Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam

Valuasi ekonomi merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh

sumber daya alam (SDA) dan lingkungan baik atas nilai pasar (*Market Value*) maupun nilai non pasar (*Non Market Value*). Valuasi ekonomi penggunaan sumber daya alam hingga saat ini telah berkembang pesat. Di dalam konteks ilmu ekonomi sumber daya dan lingkungan, perhitungan-perhitungan tentang biaya lingkungan sudah cukup banyak berkembang. Menurut Hufschmidt dalam Djijono (2002) secara garis besar metode penilaian manfaat ekonomi (biaya lingkungan) suatu sumber daya alam dan lingkungan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu berdasarkan pendekatan yang berorientasi pasar dan pendekatan yang berorientasi survei.

A. Pendekatan Orientasi Pasar

1. Penilaian manfaat menggunakan harga pasar actual barang jasa :
 - a) Perubahan dalam nilai hasil produksi (*change in productivity*)
 - b) Metode kehilangan penghasilan (*loss or earning method*)
2. Penilaian biaya dengan menggunakan harga pasar aktual terhadap masukan berupa perlindungan lingkungan
 - a) Pengeluaran pencegahan (*averted defensive expenditure methods*)
 - b) Biaya penggantian (*replacement cost methods*)
 - c) Proyek bayangan (*shadow project methods*)
 - d) *Analisa keefektifan biaya*
3. Penggunaan metode pasar pengganti (*surrogate market based methods*):
 - a) Barang yang dapat dipasarkan sebagai pengganti lingkungan
 - b) Pendekatan nilai kepemilikan
 - c) Pendekatan lain terhadap nilai tanah
 - d) Biaya perjalanan (*travel cost*)
 - e) Pendekatan perbedaan upah (*wage differential methods*)
 - f) Penerimaan kompensasi

B. Pendekatan Orientasi Survei

1. Pernyataan langsung terhadap kemauan membayar (*willingness to pay*)
2. Pernyataan langsung terhadap kemauan dibayar (*willingness to accept*)
(Sulilowati, 2009).

Konsep ini mendefinisikan nilai ekonomi sebagai nilai ekonomi total yang merupakan penjumlahan dari nilai-nilai pemanfaatan (*use values*) dan

nilai-nilai non-pemanfaatan (*non-use values*). Krutilla (1967) memperkenalkan konsep valuasi ekonomi total, yaitu sebuah usaha untuk memasukkan seluruh nilai dari kedua komponen nilai ekonomi sumberdaya alam, yaitu *use value* dan *non-use value*.

Menurut Fauzi A (2000), metode lainnya yang termasuk dalam pendekatan *nonmarked based* adalah *preventinve expenditure* dan *replacement cost*. *Preventinve expenditure* menempatkan nilai sumberdaya alam dan lingkungan dari seseorang atau individu yang memiliki keinginan membayar untuk mencegah degradasi lingkungan atau untuk mengurangi pengaruh buruk terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Adapun dalam teknik *replacement cost*, nilai sumberdaya alam didekati dari biaya atau pengeluaran untuk restorasi sumberdaya alam.

Valuasi ekonomi adalah nilai ekonomi untuk menduga total kontribusi ekonomi dari sebuah ekosistem tertentu kepada masyarakat (Bakosurtanal, 2005). Penilaian ekonomi sumberdaya juga merupakan suatu alat ekonomi (*economic tool*) yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang diberikan oleh suatu sumberdaya alam. Nilai ekonomi (*economic valuation*) dari suatu barang dan jasa diukur dengan menjumlahkan kehendak membayar *Willingness To Pay* (WTP) dari banyak individu terhadap barang dan jasa tersebut.

Nilai ekonomi total merupakan penjumlahan dari nilai ekonomi berbasis pemanfaatan atau penggunaan *use value* yang terdiri dari penggunaan langsung, penggunaan tidak langsung, nilai pilihan, nilai ekonomi berbasis bukan pemanfaatan, yang terdiri dari nilai warisan, dan nilai keberadaan (Adrianto *et al.*, 2004 dalam Agustina, 2014). moneter (Fauzi, 2004 dalam Wahyuningsih, 2015).

Penilaian berdasarkan harga non - pasar yakni sumberdaya alam selain menghasilkan barang dan jasa yang dapat di konsumsi baik langsung maupun tidak langsung, juga menghasilkan jasa-jasa lingkungan yang memberikan manfaat dalam bentuk lain, seperti ketenangan, keindahan dan lain sebagainya (Fauzi, 2004 dalam Wahyuningsih, 2015).

2.3.2 *Willingness to Pay (WTP)*

Nilai yang menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, dapat dipandang berbeda jika dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Dari sisi ekologi memandang hutan mangrove sebagai tempat berkembang biak berbagai mahluk hidup, dari sisi teknik memandang nilai hutan mangrove sebagai pencegai banjir dan abrasi. Perbedaan pandangan tentang konsep suatu nilai akan menyulitkan pemahaman tentang pentingnya suatu ekosistem. Oleh karena itu diperlukan suatu persepsi yang sama untuk penilaian ekosistem tersebut. Salah satu tolak ukur yang relative mudah dijadikan persepsi bersama sebagai disiplin ilmu adalah pemberian *price tag* (harga) pada barang dan jasa yang dihasilkan sumber daya alam dan lingkungan. Dengan demikian, kita menggunakan apa yang disebut nilai ekonomi sumber daya alam (Fauzi, 2006)

Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, konsep ini disebut keinginan membayar (*willingness to pay*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan pengukuran ini, nilai ekologis ekosistem bisa diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa (Fauzi, 2006)

- 1) WTP tidak memiliki batas bawah yang negatif.
- 2) Batas atas WTP tidak boleh melebihi pendapatan.
- 3) Adanya konsistensi antara keacakan (*randomness*) pendugaaan dan keacakan perhitungannya.

Sebagai contoh, jika ekosistem pantai mengalami kerusakan akibat polusi, nilai yang hilang akibat degradasi lingkungan bisa diukur dari keinginan seseorang untuk membayar agar lingkungan tersebut kembali keaslinya atau mendekati aslinya. Keinginan membayar juga dapat diukur dalam bentuk kenaikan pendapatan yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi *indifferen* terhadap perubahan *eksogenous* (Wahyuningsih, 2015)

Perubahan *eksogenous* ini bisa terjadi karena perubahan harga (misalnya akibat sumberdaya makin langka) atau karena perubahan kualitas sumber daya. Dengan demikian konsep WTP ini terkait erat dengan konsep *Compensating Variatiaon* dan *Equivalent Variation* dalam teori permintaan. Sisi lain dari pengukuran nilai ekonomi dapat juga dilakukan melalui pengukuran *Willingness To Accept* (WTA) yang tidak lain adalah jumlah minimum pendapatan seseorang mau menerima pnurunan sesuatu. Dalam praktik pengukuran nilai ekonomi, WTP lebih sering digunakan daripada WTA, karena WTA bukan pengukuran berdasarkan insentif sehingga kurang tepat untuk dijadikan studi yang berbasis perilaku manusia (Fauzi, 2015)

Secara faktual, karena WTP terkalit dengan pengukuran CV (*Contingen Valuation*) dan EV (*Economic Valuation*), maka WTP lebih tepat diukur berdasarkan permintaan Hicks karena harga daerah di bawah kurva permintaan Hicks relevan untuk pengukuran kompensasi (Djijono, 2002). Dalam pengukuran WTP, Haab dan McConnel dalam Fauzi (2006) menyatakan bahwa pengukuran WTP yang dapat diterima (*reasonable*) harus memenuhi syarat:

Memang diakui bahwa ada kelemahan dalam pengukuran keinginan membayar ini. Misalnya, meskipun sebagian barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dapat diukur nilainya karena diperdagangkan, sebagian yang lain, seperti keindahan pantai atau laut, kebersihan, dan keaslian alam tidak diperdagangkan sehingga tidak atau sulit diketahui nilainya, karena masyarakat tidak membayarnya secara langsung. Selain itu, karena masyarakat tidak familiar dengan cara pembayaran jasa seperti itu, keinginan membayar mereka juga sulit diketahui. Walaupun demikian, dalam pengukuran nilai sumberdaya alam, nilai tersebut tidak selalu harus diperdagangkan untuk mengukur nilai moneterinya. Yang diperlukan di sini adalah pengukuran seberapa besar kemampuan membayar (*puchasing power*) masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa dari sumber daya. Kita juga bisa mengukur dari sisi lain, yakni seberapa besar masyarakat harus diberi kompensasi atas hilangnya barang dan jasa dari sumber daya dan lingkungan (Fauzi, 2006).

2.3.3 Travel Cost Method (TCM)

Metode *Travel Cost metho* (TCM) diturunkan dari pemikiran yang dikembangkan oleh Hotelling pada tahun 1931, yang kemudian secara formal diperkenalkan oleh Woodman Trice serta Clawson dan Knetsch dalam Fauzi (2006). Metode ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis permintaan terhadap rekreasi dan sebagainya. Secara prinsip, metode ini mengkaji biaya yang dikeluarkan setiap individu untuk mendatangi tempat-tempat rekreasi. Dengan mengkaji pola ekpenditur dari konsumen, kita bisa mengkaji berapa nilai (*value*) yang diberikan konsumen kepada sumber daya alam dan lingkungan. TCM dapat dipakai untuk estimasi manfaat atau biaya ekonomi yang dihasilkan dari:

- a) Perubahan biaya akses untuk suatu lokasi wisata
- b) Eliminasi lokasi wisata yang ada
- c) Penambahan lokasi wisata baru
- d) Perubahan kualitas lingkungan pada suatu lokasi wisata

Premis dasar dari TCM adalah bahwa waktu dan biaya perjalanan yang dibelanjakan oleh individu untuk mengunjungi suatu lokasi mencerminkan “harga” bagi akses ke lokasi itu. Dengan demikian, kesediaan membayar (*willingness to pay*) orang-orang untuk mengunjungi lokasi itu dapat diestimasi berdasarkan banyaknya perjalanan yang mereka lakukan dengan beragam biaya perjalanan. Hal ini analog dengan estimasi kesediaan membayar (WTP) orang-orang itu untuk suatu barang yang dipasarkan berdasarkan kuantitas barang yang diminta pada beragam harga.

A. Keunggulan TCM

TCM dipilih untuk valuasi ini berdasarkan dua alasan utama:

- a) Lokasi sangat bernilai bagi orang-orang sebagai lokasi wisata. Di lokasi ini tidak ada spesies langka atau keunikan lain yang akan membuat “*non-use values*” di lokasi ini significant.
- b) Anggaran bagi proyek untuk melindungi lokasi ini relative murah. Sehingga penggunaan metode yang relatif murah seperti TCM menjadi sangat menarik.

B. Pilihan Penerapan TCM

Ada beberapa cara untuk mendekati permasalahan, dengan menggunakan variasi TCM, variasi ini adalah:

- a) Pendekatan *Zonal travel cost* sederhana, dengan memaksimumkan penggunaan data sekunder, dengan sedikit data primer sederhana yang dikumpulkan dari para pengunjung.
- b) Pendekatan *Individual travel cost*, dengan menggunakan survey yang lebih detail pada para pengunjung.
- c) Pendekatan *Utilitas random*, menggunakan data survey dan data lainnya, dan teknik-teknik statistic yang lebih rumit.